

Strategi Komunikasi Massa Aksi dalam Mendorong Tuntutan Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol : Analisis Dinamika Sosio – Politik dan Retorika Publik

Aldi Adi Pratama^{1*}, Agung Dharma Yuda Adi Ramadhan²

Institut Pertanian Bogor¹

Universitas Jember²

Email : aldiadipratama20839aldi@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Korea Selatan berhasil membangun demokrasi yang stabil sejak akhir 1980, dengan tetap mempertahankan nilai Asia, pasca Tragedi Gwangju telah mengakhiri pelaksanaan pemerintahan militer ditandai dengan reformasi bidang politik dan pemilihan eksekutif yakni presiden secara demokratis oleh rakyat 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, dan langkah ini memicu protes luas dan kritik dari berbagai kalangan bentuk bagian dari partisipasi aktif masyarakat, dalam mengemukakan pendapat, terutama pengawasan kebijakan eksekutif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi komunikasi yang digunakan demonstran. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan berfokus pada analisis yang terkandung dalam komunikasi verbal atau non-verbal dalam berbagai bentuk media, seperti teks, gambar, video, atau audio. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemakzulan Presiden Korea Selatan menjadi isu besar yang mencerminkan dinamika politik yang intens dan perhatian publik yang luas. Dominasi sentimen negatif dan partisipasi aktif masyarakat menandakan adanya polarisasi yang signifikan dalam opini publik. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan diskusi, sementara media tradisional menjaga kredibilitas isu ini. Strategi komunikasi yang transparan dan inklusif diperlukan untuk mengelola sentimen publik dan mencegah eskalasi ketegangan sosial.

Kata Kunci : Pemakzulan, Politik, Presiden, Publik, Media.

Abstract

South Korea has succeeded in building a stable democracy since the end of 1980, while maintaining Asian values, after the Gwangju Tragedy, ending the implementation of military rule was marked by political reform and democratic election of the executive, namely the president, by the people. December 3 2024, South Korean President Yoon Suk Yeol announced martial law, and this step sparked widespread protests and criticism from various groups, part of the active participation of society, in expressing opinions, especially monitoring executive policies. This research aims to analyze the forms of communication strategies used by demonstrators. This research method uses quantitative methods by focusing on the analysis contained in verbal or non-verbal communication in various forms of media, such as text, images, video or audio. The research results reveal that the impeachment of the President of South Korea is a major issue that reflects intense political dynamics and broad public attention. The dominance of negative sentiment and active community participation indicates significant polarization in public opinion. Social media plays an important role in spreading information and discussion, while traditional media maintains the credibility of this issue. Transparent and inclusive communication strategies are needed to manage public sentiment and prevent the escalation of social tensions.

Keywords: *Impeachment, Politics, President, Public, Media.*

PENGANTAR

Korea Selatan adalah negara yang sukses menjalani proses industrialisasi secara cepat dan kini telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia (Daniela & Soemantri, 2024). Setelah bertahun-tahun berada di bawah pemerintahan otoriter, negara dengan popularitas industri film dan musik ini berhasil membangun demokrasi yang stabil sejak akhir 1980, dengan tetap mempertahankan nilai Asia .

Tercatat negara ini pernah berada di bawah pemerintahan otoriter, yang mencakup pemerintahan Syngman Rhee (1948–1960), Park Chung-hee (1961–1979), dan Chun Doo-hwan (1980–1988). Rezim ini dikenal dengan pembatasan hak politik dan kebebasan media. Pasca gerakan protes besar yang dipimpin oleh mahasiswa dan buruh, Korea Selatan berhasil mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis. Ini termasuk adopsi konstitusi baru yang memungkinkan pemilihan presiden langsung dan mengurangi kontrol pemerintah terhadap kebebasan politik. Lebih tepatnya Tragedi Gwangju pada tahun 1980 telah mengakhiri pelaksanaan pemerintahan militer dan melahirkan Korea menjadi negara dengan sistem demokrasi secara inklusif, ditandai dengan reformasi bidang politik dan pemilihan eksekutif yakni presiden secara demokratis oleh rakyat (Mubarak et al., 2024). Sebagai contoh di era kontemporer, demokrasi inklusif di Amerika Serikat menuntut partisipasi yang lebih luas dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Oleh karena itu, memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, melakukan reformasi, dan meningkatkan akses politik menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan setara. Dengan pelajaran dari sejarah, Amerika Serikat dapat terus memperbaiki dan mempertahankan perannya sebagai contoh demokrasi yang efektif dan inklusif di masa depan (Putri et al., 2024)

Negara Korea Selatan memiliki sistem hampir mirip dengan di Indonesia, yakni sistem republik presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan lima tahun. Adapun Presiden berfungsi dan menduduki sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada tatanan eksekutif dan legislatif yakni Majelis Nasional, yang terdiri dari 300 anggota, bertugas membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan eksekutif. Meskipun presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat, sistem pemerintahan di Korea Selatan menjamin adanya pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*. Maka dari itu, presiden perlu menghormati aturan demokrasi di luar prosedural (G.-W. Shin, 2022). Di posisi yudikatif, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan konstitusi, termasuk dalam kasus pemakzulan presiden. Sistem pemerintahan yang ideal ini, diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat korea selatan untuk saling mengawasi kebijakan. Semua lembaga tersebut membutuhkan partisipasi politik akar rumput, dan saluran partisipasi akan membuat politisi dapat melakukan tanggung jawab atas rakyat (Lee, 2022).

Pada 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dengan alasan untuk "*menyelamatkan negara dari pihak-pihak yang mencoba melumpuhkan fungsi penting negara dan menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi liberal.*" Langkah ini memicu protes luas dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk partai

oposisi yang menilai tindakan tersebut sebagai upaya untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengancam demokrasi. Tindakan tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa isu politik yang dianggap berbahaya merupakan isu keamanan yang harus diselesaikan (Dwijayani & Maksum, 2024). Menanggapi tekanan publik dan parlemen, Yoon mencabut status darurat militer sehari setelah pengumumannya. Namun, pada 7 Desember 2024, Yoon menyampaikan permintaan maaf publik atas tindakannya, mengakui bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Meskipun demikian, partai oposisi utama, Partai Demokrat, tetap mendorong pemakzulan Yoon. Pada 14 Desember 2024, Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol dengan 204 dari 300 anggota parlemen mendukung. Dengan pemakzulan ini, jabatan Yoon ditangguhkan, dan Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai pejabat presiden. Kasus ini kini akan diproses di Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah Yoon akan secara permanen dicopot dari jabatannya atau dikembalikan sebagai presiden. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberhentikan Yoon secara permanen, ia akan menjadi presiden Korea Selatan kedua yang dimakzulkan setelah Park Geun-hye pada 2017.

Telaah problematika yang telah dijelaskan, dijadikan rujukan peneliti untuk merumuskan masalah, yakni bagaimana kelompok demonstran menggunakan strategi komunikasi massa aksi untuk mendorong tuntutan pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Diikuti dengan elemen retorika publik apa saja yang diterapkan oleh demonstran dalam menyampaikan pesan-pesan aksi kepada masyarakat dan pemerintah. Serta menelusuri bagaimana dinamika sosio-politik di Korea Selatan mempengaruhi pola komunikasi massa aksi dalam mendukung tuntutan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Desakan problematika pemakzulan ini, merupakan bentuk bagian dari partisipasi aktif masyarakat, dalam mengemukakan pendapat, terutama pengawasan kebijakan eksekutif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi komunikasi yang digunakan demonstran, seperti Meneliti jenis pesan yang disampaikan oleh para demonstran, baik melalui media konvensional (seperti spanduk, pidato, dan media massa) maupun *platform* media sosial. Diikuti dengan menilai efektivitas strategi komunikasi yang digunakan dalam menarik perhatian publik dan media terhadap tuntutan mereka.

METODE RISET

Metode penelitian ini menggunakan metode campuran dalam penelitian dengan tujuan menggabungkan kelebihan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, mendalam, dan holistik mengenai fenomena yang sedang dikaji. Metode kuantitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena terhadap praktik-praktik yang merubah kondisi sosial dan politik (Ramadhan et al., 2024). Kualitatif yang digunakan akan berfokus pada eksplorasi dan analisis konten. Analisis konten merupakan metode riset yang digunakan untuk menganalisis pesan-pesan yang terkandung dalam komunikasi verbal atau non-verbal dalam berbagai bentuk media, seperti teks, gambar, video, atau audio.

Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan *trend* dalam konten yang dianalisis. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana suatu pesan disusun dan diterima oleh audiens. Fokus utama riset berupa analisis konten yang disampaikan oleh demonstran di media sosial atau media massa menggambarkan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Adapun jenis analisis yang difokuskan seperti berikut :

a. Jenis Bahasa

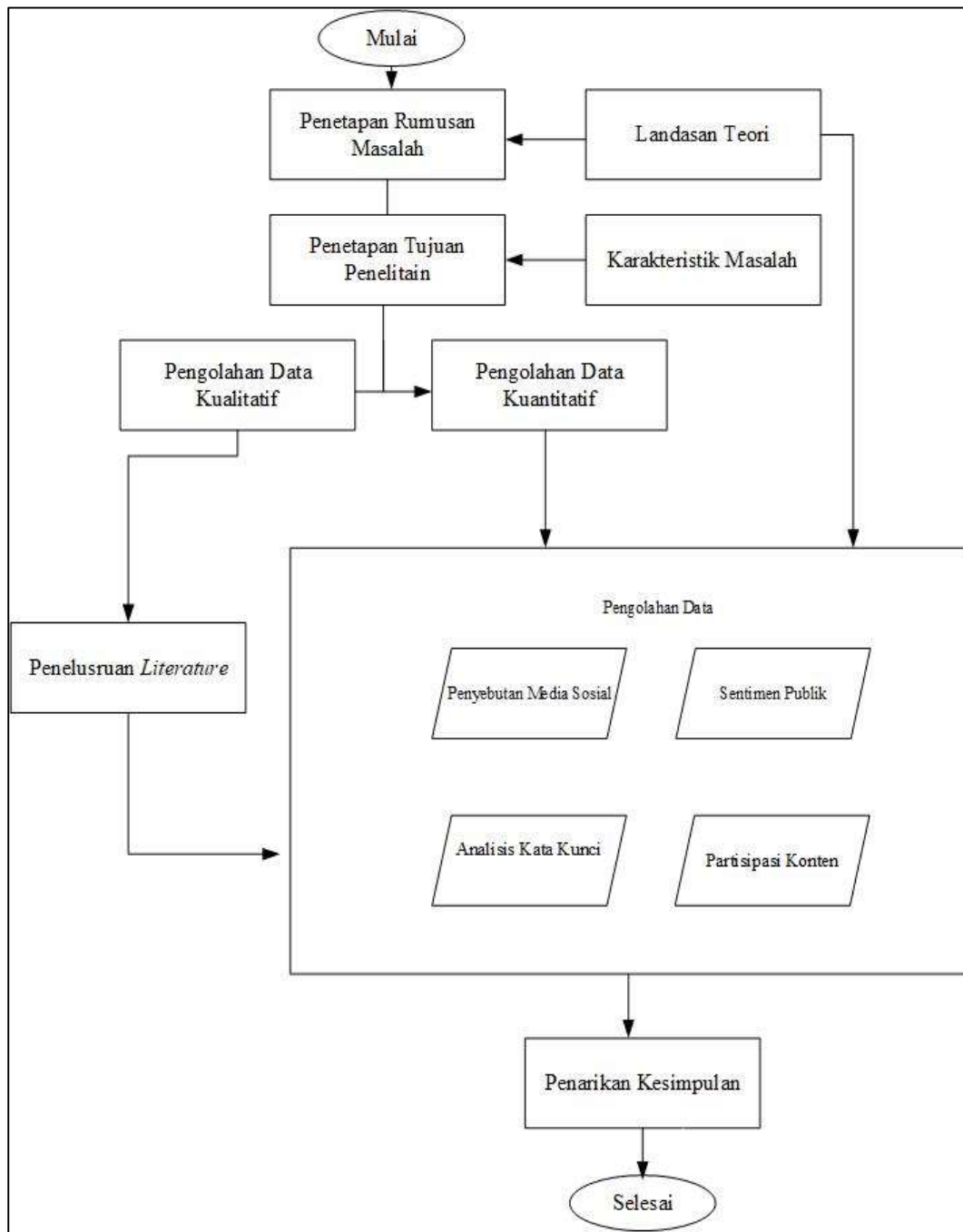
Analisis Bahasa yang digunakan oleh demonstran, ditujukan untuk menelaah kata, kalimat, pesan, yang bersifat tuntutan atau hampir mendekati satire.

b. Frekuensi Penggunaan *Hashtag*

Perhitungan *hashtag* ini bertujuan mengetahui seberapa besar media melakukan frekuensi penyertaan seperti #PemakzulanYoon. Namun, untuk meningkatkan jumlah temuan kata, peneliti ingin menyertakan kata dengan Bahasa Inggris lebih lanjut.

c. Jenis Gambar atau Video

Peliputan media yang dianalisis bersumber pada media nasional utama, yang terlibat langsung dalam penayangan demonstrasi di lapangan. Jenis gambar atau video yang diambil diutamakan bersumber dari media lokal Korea Selatan.



Gambar 1 Alur Metode Penelitian

PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan skala tanggal media cetak maupun elektronik yang dipublikasikan, dari 3 sampai dengan 16 Desember 2024. Data gambar ditelusuri dengan kata kunci spanduk, slogan, *martial law* di halaman media lokal negara tersebut. Penelusuran awal, peneliti mendapatkan sebuah foto yang bersumber dari laman The Korea Times, mengenai tulisan yang dikemas menyerupai bentuk peti kematian dalam proses pemakaman. Proses komunikasi tersebut, mengarah pada sifat satire dalam dunia komunikasi.



Gambar 2 Peserta Unjuk Rasa di Kantor Regional Partai Kekuatan Rakyat.
(Sumber : The Korea Times, 2024)

Komunikasi satire merupakan bentuk penyampaian komunikasi yang menggunakan humor, ironi, sarkasme, atau ejekan untuk menyampaikan kritik terhadap individu, kelompok, fenomena sosial, atau institusi tertentu. Satire bertujuan untuk menggugah kesadaran, memprovokasi pemikiran kritis, atau mengundang perubahan sosial dengan cara yang sering kali menghibur, tetapi tetap tajam dan menusuk.



Gambar 3 Pengunjuk Rasa di dekat Majelis Nasional, Seoul, Korea Selatan, 7 Desember 2024.
(Sumber : The Korea Times. AP-Yonhap, 2024)

Meski kritis, komunikasi satire dirancang untuk menarik perhatian dan membuat audiens tertawa atau merenung, terhadap proses demokrasi di Korea Selatan.

Pola umpan balik juga dilakukan dalam proses satire, guna mendapatkan respons publik terhadap isu yang sedang berjalan (Shuyen et al., 2024). Aksi protes ini sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa protes unjuk rasa penduduk, cenderung tidak menggunakan kekerasan dan harus disesuaikan dengan ruang lingkup yang ada (Kim et al., 2024).

Tagar yang sedang tren		
1	#impeachment	1205 Menyebutkan
2	#southkorea	860 Menyebutkan
3	#yoonsukyeol	557 Menyebutkan

Gambar 4 Tagar *Trend* di Korea Selatan

Analisis penggunaan *hashtag* (#) *impeachment*, dari 3 sampai dengan 19 Desember 2024 dengan 11 kategori media *online*, menempati urutan pertama dari berbagai media, pada wilayah negara Korea Selatan dengan total 35.965 sebutan. Sosial media turut menjadi representasi dari demokrasi baru di era globalisasi, karena publik memanfaatkannya untuk melakukan protes atas kebijakan politik pemerintah, yang dianggap bertentangan dengan prinsip negara (Apriyani, 2021).

1. Penggunaan Media Sosial

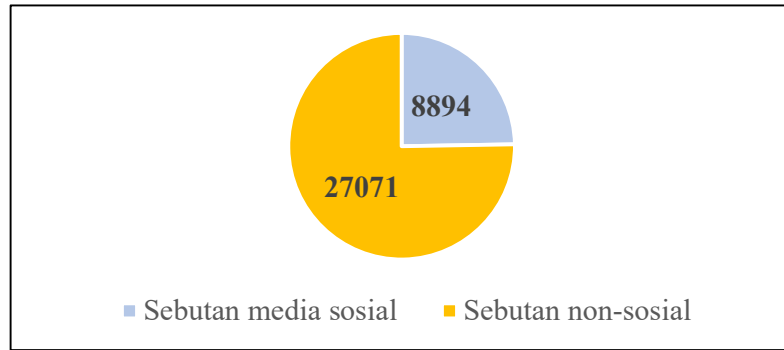
Penggunaan media sosial dengan jangkauan yang sangat besar, mampu memainkan peran penting dalam membentuk narasi publik. *Trend hashtag* bisa menunjukkan sentimen kolektif yang berdampak pada persepsi global.

1. Media Sosial (8.894 sebutan)

Media sosial sering menjadi arena diskusi publik. Dengan jumlah sebutan yang signifikan, terlihat bahwa masyarakat umum aktif membahas *impeachment* melalui *hashtag*, unggahan, dan komentar. Namun, jumlahnya lebih kecil dibanding media non-sosial, mungkin karena media tradisional lebih mendalam meliput isu ini. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penyebab polarisasi aktif terkait dengan efek media partisan (H. Shin et al., 2024)

2. Media Non-Sosial (27.071 sebutan)

Media tradisional, seperti berita *online*, menjadi sumber utama penyebutan. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat formal dan serius dari *impeachment* yang memerlukan analisis mendalam, yang biasanya disampaikan oleh jurnalis atau pakar.



Gambar 5 Persebaran Sebutan Media

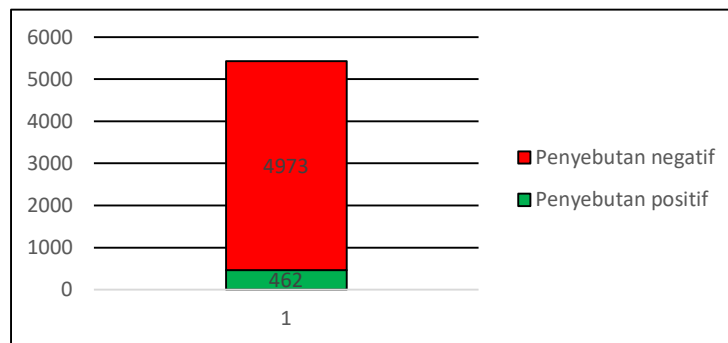
2. Sentimen Publik

a. Positif (462 sebutan)

Sentimen positif relatif rendah, yang bisa berarti dukungan terhadap pemakzulan Presiden, melihatnya sebagai langkah demokratis yang penting untuk mempertahankan kepercayaan publik pada sistem hukum dan politik.

b. Negatif (4.973 sebutan)

Tingginya sentimen negatif menunjukkan kekecewaan atau ketidakpuasan, baik terhadap proses *impeachment* itu sendiri, presiden yang dimakzulkan, atau dampak politik dan ekonomi dari krisis ini. Reaksi negatif juga bisa mencerminkan polarisasi masyarakat, di mana sebagian kelompok tidak sepakat dengan langkah ini.



Gambar 6 Data Penyebutan Positif dan Negatif

3. Jangkauan dan Viralitas

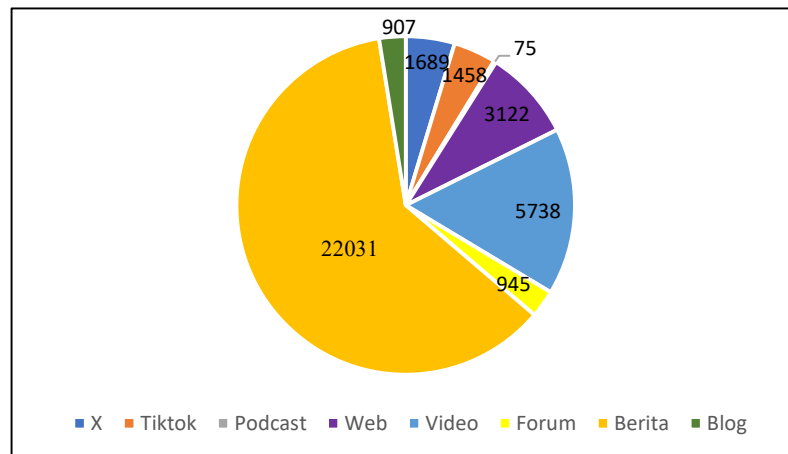
a. Media Sosial (213.572.254)

Jangkauan yang sangat besar di media sosial menunjukkan bahwa isu ini menjadi viral, menarik perhatian dari pengguna lokal maupun internasional. Hal ini juga mencerminkan kekuatan *platform* digital dalam menyebarluaskan informasi, opini, dan kampanye terkait.

b. Media Non-Sosial (205.887.844)

Jangkauan yang hampir setara dengan media sosial menunjukkan bahwa media tradisional tetap memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan memberikan narasi yang lebih resmi.

3. Kehadiran (*Presence Score*: 58)
Presence Score yang berada di angka 58 menunjukkan isu ini menjadi perbincangan utama di media, meskipun tidak mencapai tingkat maksimum. Ini bisa menjadi indikasi bahwa perhatian masyarakat terhadap isu ini bersifat terfokus tetapi mungkin terpecah dengan isu lain.
4. Nilai Media (AVE: \$27.767.349)
 AVE yang tinggi menunjukkan bahwa eksposur media terkait *impeachment* memiliki nilai komersial yang setara dengan investasi besar dalam kampanye iklan. Ini menunjukkan tingkat perhatian media yang sangat tinggi.
5. Partisipasi Publik
 Konten Buatan Pengguna (10.812 konten), angka ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga berkontribusi aktif melalui opini, ulasan, atau diskusi. Ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang tinggi, khususnya di media sosial. Masyarakat Korea Selatan menyadari bahwa dalam menjalankan pemerintahan sistem negara hasil demokrasi yang baik perlu adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat ikut ambil dalam pengawasan kebijakan terutama permasalahan politik yang sedang berlangsung (Oktaviani & Mulyana, 2018).



Gambar 7 Temuan Data Persebaran 8 *Hashtag*

Strategi Komunikasi yang Relevan

- a. Mengelola Sentimen
 Pemerintah atau pihak yang terkait perlu memperhatikan sentimen negatif dan berusaha mengkomunikasikan proses *impeachment* secara transparan untuk mengurangi misinformasi. Sentimen negatif yang dominan dapat menjadi indikasi adanya polarisasi masyarakat. Proses *impeachment* mungkin menjadi pemicu

ketegangan di antara pendukung Presiden dan pihak oposisi. Proses *impeachment* meskipun kontroversial, mencerminkan mekanisme demokrasi yang sedang berjalan. Dukungan melalui sentimen positif menunjukkan kepercayaan pada sistem hukum.

b. Memanfaatkan Media Sosial

Generasi muda memegang peranan penting dalam membentuk kebijakan demokrasi di Korea Selatan. Sebagai kelompok yang dinamis dan progresif, mereka memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi politik, reformasi sosial, dan memperkuat sistem demokrasi melalui media maupun aksi langsung. Penggunaan jangkauan yang besar, media sosial bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesan resmi atau klarifikasi, terutama kepada generasi muda yang aktif di *platform*. Langkah konkrit ini lebih mengarah pada tujuan integrasi kekuatan media sosial dalam strategi komunikasi, dan mengadopsi media massa sebagai rekan andalan dalam menghadapi krisis politik (Nirmalasari, 2020). Dengan peran tersebut, generasi muda tidak hanya menjadi saksi proses demokrasi, tetapi juga aktor utama yang membentuk masa depan negara. Keterlibatan mereka sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap relevan, inklusif, dan tangguh menghadapi tantangan zaman.

Prinsip Demokrasi Ideal

Demokrasi di Korea Selatan telah berkembang menjadi salah satu sistem pemerintahan yang maju, terutama setelah transisi dari rezim otoriter di akhir 1980-an. Dalam konteks kebijakan presiden, demokrasi yang ideal ditandai oleh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap konstitusi. Penggunaan teknologi komunikasi digital, seperti pemanfaatan media sosial untuk mendistribusikan informasi politik, berpartisipasi dalam forum diskusi politik secara daring, serta ikut serta dalam kampanye politik melalui berbagai platform digital, dapat menciptakan peluang baru bagi individu maupun kelompok untuk terlibat dalam dinamika politik. Meskipun demikian, dampak dari penerapan teknologi komunikasi digital terhadap tingkat partisipasi politik tidak selalu memberikan hasil yang menguntungkan, karena hasilnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan cara penggunaannya (Rizky et al., 2023). Walaupun dalam praktiknya, ditemukan kesenjangan berupa perbedaan antara perempuan dan laki-laki di Korea Selatan masih cukup besar, yang berdampak pada rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen meskipun prinsip demokrasi diterapkan (Hilda Indah Bahirah, 2023). Berikut adalah aspek prinsip demokrasi yang ideal, utamanya:

a. Tanggung Jawab Presiden

Korea Selatan menganut sistem liberal yang meliputi prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, serta penerapan ekonomi berbasis pasar (Rustamana et al., 2023). Maka dari itu presiden bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat, dengan pengawasan dari media, parlemen, dan masyarakat sipil. Sistem hukum yang adil memungkinkan penegakan hukum terhadap presiden, seperti dalam kasus korupsi yang melibatkan

mantan pemimpin negara. Pada pelaksanaan di era digital penggunaan media sosial sebagai alat yang efektif dalam kampanye politik telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, di mana media sosial berperan dalam meningkatkan transparansi dan mendukung e-demokrasi secara global. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai alat pengawas kebijakan serta mediasi, yang memungkinkan komunikasi langsung antara politisi dan masyarakat tanpa melalui media massa tradisional. Namun, media sosial juga dapat berperan sebagai dismediator sehingga memungkinkan partisipasi politik yang lebih terbuka dan langsung namun dengan kontrol yang lebih sedikit dari media konvensional (Cobis & Rusadi, 2023)

b. Peran Aktif Masyarakat

Warga negara terlibat aktif dalam proses kebijakan melalui unjuk rasa damai, petisi, dan partisipasi dalam pemilu. Contohnya adalah "*Candlelight Protests*" tahun 2016, yang menunjukkan kekuatan masyarakat dalam menuntut akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil juga diperlukan sebagai syarat atau kondisi awal untuk mendukung demokrasi serta dalam proses pembangunan demokrasi guna mencapai demokrasi yang terkonsolidasi (Asrida et al., 2021) .

c. Keterbukaan Kebijakan

Kebijakan presiden disampaikan secara jelas kepada publik, mencakup tujuan, anggaran, dan dampaknya. Masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik, sehingga dapat memahami dan menilai kebijakan pemerintahan. Transparansi dalam kebijakan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terbuka, masyarakat dapat melihat bahwa keputusan diambil berdasarkan data, logika, dan kepentingan publik. Ketika kebijakan dibuat secara transparan, ide-ide baru dari berbagai pihak dapat diintegrasikan untuk menciptakan solusi yang lebih efisien. Kebijakan yang didasarkan pada masukan masyarakat lebih mungkin mendapatkan dukungan luas. Dengan mendengar kebutuhan rakyat, presiden dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan diterima oleh semua pihak. Hal ini terbukti, dengan Proses penanganan tersebut inilah, yang menjadikan Korea

d. Proses Konsultatif

Presiden melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, termasuk oposisi, akademisi, dan masyarakat. Dengan mendengarkan rakyat, presiden tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi, menciptakan keadilan sosial, dan menjaga stabilitas serta kemajuan negara. Dalam kebijakan penting, seperti hubungan dengan Korea Utara, dialog nasional sering dilakukan untuk memperoleh dukungan luas.

e. Pembagian Kekuasaan

Kekuasaan presiden diimbangi oleh parlemen dan sistem peradilan yang independen. Parlemen dapat menyetujui atau menolak kebijakan, sementara Mahkamah memastikan kebijakan presiden sesuai dengan konstitusi.

KESIMPULAN

Pemakzulan Presiden Korea Selatan menjadi isu besar yang mencerminkan dinamika politik yang intens dan perhatian publik yang luas. Dominasi sentimen negatif dan partisipasi aktif masyarakat menandakan adanya polarisasi yang signifikan dalam opini publik. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan diskusi, sementara media tradisional menjaga kredibilitas isu ini. Strategi komunikasi yang transparan dan inklusif diperlukan untuk mengelola sentimen publik dan mencegah eskalasi ketegangan sosial.

REFERENSI

- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital (The Role of Social Media in Mass Protest Movements and New Democracy in the Digital Age). *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17–30.
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Cobis, M. Y., & Rusadi, U. (2023). Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(4), 1196–1208. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v3i4.3314>
- Daniela, N. A., & Soemantri, A. I. (2024). South Korea and North Korea: Differences in Ideology and Their Impact on War. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(3), 277–286. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i3.8462>
- Dwijayani, R. H., & Maksun, A. (2024). The Democratic People’s Republic of Korea’s Law on the Elimination of Reactionary Thought and Culture Under Kim Jong-Un’s Leadership. *Jurnal Ilmu Sosial*, 22(2), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jis.22.2.2023.1-17>
- Hilda Indah Bahirah. (2023). The Effect of the Electoral System on Women’s Elections in Parliament (Case Study of South Korea). *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.22219/jpa.v6i1.22238>
- Kim, G., Kim, Y. Bin, & Kwak, D. (2024). Public Opinion, Rivalry, and the Democratic Peace: Experimental Evidence from South Korea. *International Studies Quarterly*, 68(2), 1–8. <https://doi.org/10.1093/isq/sqae027>
- Lee, M. (2022). Top-down Democracy in South Korea by Erik Moberand. In *Korean Studies* (Vol. 46, Issue 1). <https://doi.org/10.1353/ks.2022.0015>
- Mubarak, M. A., Samsudin, D., & Triarisanti, R. (2024). Revolusi Korea: Dari Pemerintahan Militer Ke Demokrasi (1980-1987). *Jurnal Pendidik Dan Peneliti ...*, 7(1), 83–92. <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/view/69495%0Ahttps://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/viewFile/69495/27532>
- Nirmalasari, A. (2020). Crisis Management in Public Relations: Meta-Synthesis Analysis of Online Activism. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2). <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.2446>
- Oktaviani, R. A., & Mulyana, A. (2018). Perlawanan Masyarakat Korea Selatan Menuju Gerbang Demokrasi Tahun 1980. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 227–240. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15608>
- Putri, S. A., Safitri, F., SM, I. C., Ananda, R. D., Andira, B. I., Zalukhu, D., & Zai, D.

- (2024). Perkembangan Demokrasi di Amerika Serikat: Dari Revolusi hingga Era Modern. *Polyscopia*, 1(3), 69–73. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1338>
- Ramadhan, A. D. Y. A., Rosa, D. V., & Prasetyo, H. (2024). Pursuing Uniqueness: Unpacking the Social Identity of Young Urban Migrants through Coffee Culture. *SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(3), 215–224. <https://doi.org/10.31940/soshum.v14i3.215-224>
- Rizky, M. I., Putra, B. I., Triatmaja, R. R., Nugraha, B. A., Putra, W. A., & Radianto, D. O. (2023). Analisis Hubungan Antara Teknologi dan Politik: Studi Kasus Mengenai Pengaruh Teknik Komunikasi Digital Terhadap Partisipasi Politik. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(3), 545–551. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.4166>
- Rustamana, A., Andayasari, M. P., Risanda, M. H., Rachmawati, N., & Lutfiah, L. (2023). Menganalisis Perkembangan Kekinian Dari Negara Korea Utara Dan Korea Selatan. *Cendekia Pendidikan*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.9644/scp.v1i1.332>
- Shin, G.-W. (2022). South Korea's Democratic Decay. *Journal of Democracy*, 31(3), 100–114.
- Shin, H., Yang, J. W., & Hahm, S. D. (2024). Affective Polarization in the 2022 South Korean Presidential Election: Causes and Consequences*. *Korea Observer*, 55(2), 273–296. <https://doi.org/10.29152/KOIKS.2024.55.2.273>
- Shuyen, Budianto, K., & Zalpa, Y. (2024). Satire Politik Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Kasus Program Laporan Pak Trans 7). *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, 3(1), 28–38.